

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adjie, Habib, 2008, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung.
- Alfitra, 2022, *Upaya Penanggulangan Pencucian Uang*, Raih Asa Sukses, Depok.
- Ali, Zainuddin, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dewata, Fajar Nur, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Garnasih, Yenti, 2016, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Harmadi, 2011, *Kejahatan Pencucian Uang (Modus-modus Pencucian Uang di Indonesia)*, Setara Press, Malang.
- Henry, Campbell Black, 1990, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co, St. Paul Minnesota.
- HS, Halim, 2018, *Peraturan Jabatan Notaris*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Husein, Yunus, 2005, *Negeri Sang Pencuci Uang*, Pustaka Juanda Tigalima, Jakarta.
- _____, 2007, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Books Terrace and Library, Bandung.
- Mahja, Djuhad, 2005, *Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Durat Bahagia, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2019, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana, Jakarta.
- Mulyoto, 2011, *Perjanjian: Teknik, Cara Membuat dan Hukum Perjanjian yang Harus dikuasai*, Cakrawala Media, Yogyakarta.

- Nawawi, Hadari, 2005, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Notodisoerjo, R. Soegondo, 1982, *Hukum Notariat di Indonesia*, Books Terrace & Library, Bandung.
- _____, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada.
- Nurwulan, Pandam, 2023, *Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan oleh Notaris*, Buku Litera, Yogyakarta.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2010, *Modul E-Learning 2 Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dan Pelaporan Bagi Pihak Pelapor dan Pihak Lainnya*, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Jakarta.
- Sahetapy, Jacob Elfinus, 2003, *Bussines Uang Haram*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta.
- Siahaan, NHT, 2005, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Sjahdeini, Sutan Remy, 2007, *Seluk-Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Sjaifurrachman, dan habib adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung.
- Suharsimi Arikuntoro, 2012, *Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sumardjono, Maria S.W. ,1997, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Syamsudin, M., *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2007.
- Tobing, G.H.S Lumban, 1980, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Erlangga, Jakarta.
- _____, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris, (Notaris Reglement)*, Erlangga, Jakarta.
- Wiyono, R., 2014, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164).\

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5709).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6680).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.

Peraturan Kepala PPATK Nomor: Per-1o/1.02.1/PPATK/09/2011 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lainnya.

C. Jurnal dan Tesis

Armanda, Rizky, 2015, "Pengaruh Financial Action Task Forces on Money Laundering terhadap Terbentuknya Undang-undang Pencucian Uang di Indonesia", *Jurnal Online Mahasiswa*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Vol. 2. No 2.

Damayanti, Guslina, 2016, "Peran Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang", *Tesis*, Program

Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Husein, Yunus, 2004, “Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundry) Dalam Perspektif Hukum Internasional”, *Journal Of International Law*, Vol 1, No 2, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Izazi, Nadhilah, Sulistio Adiwinarto, 2024, “Akibat Hukum Akta Notaris Yang Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Journal of Law and Justice*, Vol 1, No. 4. Universitas Muhammadiyah, Jember.

Khamisah, Andi et.al, 2014, “Kewenangan Notaris dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Pembelian Saham”, *Jurnal Analisi*, Desember Vol. 3 No. 2, Program Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Kristiyana, Risa, 2017, “ Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris dan PPAT sebagai Pihak Pelapor dalam pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Tesis*, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Ruslie, Ahmad Sholikhin, 2022, “Pengenalan Terhadap Bahaya dan Dampak Pencucian Uang serta Kontribusi yang Bisa Diberikan Guna Mencegah Praktik Pencucian Uang di lingkungan Sekitar”, *Prosiding Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya.

Sari, Mudiana Permata , 2017, “Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Oleh Notaris Sebagai Pihak pelapor Terhadap Transaksi Mencurigakan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Tesis*, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

D. Internet

Handoko, Triyo, dan Abdul Jalil, 2023, “Yogyakarta Disebut Jadi Tempat Favorit Pencucian Uang Pejabat”, <https://jogja.solopos.com/yogyakarta-disebut-jadi-tempat-favorit-pencucian-uang-pejabat-1569172>.

Hayes, Adam, 2024, “What Is White-Collar Crime? Meaning, Types, and Examples”, <https://www-investopedia-com.translate.goog/terms/w/white-collar-crime.asp?>.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Banten, 2022, “Tata Cara Pengisian Formulir Customer Due Diligence”, <https://banten.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita->

utama/8347-tata-cara-pengisian-form-penerapan-prinsip-mengenali-pengguna-jasa-pmpj.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa tengah, 2023, “Cegah Tindak Pidana Pencucian Uang melalui Notaris, Kemenkumham Jateng Akan Lakukan Hal Ini”, <https://jateng.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/8056-cegah-tindak-pidana-pencucian-uang-melalui-notaris-kemenkumham-jateng-akan-lakukan-hal-ini>.

Nurniasih, Nina, 2021, “Focus Group Discussion Optimalisasi Upaya Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT Melalui Sistem Aplikasi Pelaporan GoAML”, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-batam/baca-berita/24699/Focus-Group-Discussion-Optimalisasi-Upaya-Pencegahan-dan-Pemberantasan-TPPU-dan-TPPT-Melalui-Sistem-Aplikasi-Pelaporan-GoAML.html>.

Nusobah, Asep, 2021, “Pencucian Uang”, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/1897-pencucian-uang>.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, “Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Bagian 2: Pengenalan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa”, <http://elearnig.ppatk.go.id>.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2016, “Pedoman Pelaporan”, <https://www.ppatk.go.id/pelaporan/read/50/pedoman-pelaporan.html>.

Sari, Erizka Permata, 2021, “Mengenal Perusahaan Cangkang dan Potensi Penyalahgunaannya”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-perusahaan-cangkang-dan-potensi-penyalahgunaannya-lt607e98841fa61/>.

Sofian, Ahmad, 2024, “Mengenal Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang”, <https://business-law.binus.ac.id/2024/05/09/mengenal-pembuktian-tindak-pidana-pencucian-uang/>.

Surjanto, Deni, 2023, “Indonesia Menjadi Anggota Penuh Financial Action Task Force (FATF) ke-40”, <https://fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers-detil/538>.

Ulfa, Maulina, 2023, “Harga Rumah Naik 2 Persen di Q4 2022, Yogyakarta Paling Menjerit”, <https://www.idxchannel.com/economics/harga-rumah-naik-2-persen-di-q4-2022-yogyakarta-paling-menjerit>.